

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN
LAMPUNG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
(Studi di Disdukcapil Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Oleh :
Era Anastasya
NPM. 1921020482**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN
LAMPUNG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
(Studi di Disdukcapil Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:
Era Anastasya
NPM. 1921020482

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing 2 : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, dalam kata lain Tertib Administrasi merupakan kegiatan pelayanan publik yang harusnya dilakukan pemerintah secara baik. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tertib administrasi kependudukan. Permasalahan yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara adalah masyarakat mengeluh terkait pelayanan dalam proses administrasi kependudukan yang lama, dan disiplin kerja pegawai yang kurang baik. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan tata tertib administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana pandangan fikih Siyasah terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tertib Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tertib administrasi kependudukan dan menganalisis pandangan fikih siyasah terhadap peraturan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang tertib administrasi kependudukan di kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pada data yang diperoleh dilapangan yang berlokasi di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan langsung dari Perangkat Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari arsip Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara terkait kondisi geografis, Demografis dan data lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan cara menggambarkan keadaan dilapangan dan fenomena langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Tertib Administrasi Kependudukan berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan dalam pelayanan Pembuatan KTP, KK dan catatan sipil lainnya sehingga pemerintah mampu meningkatkan upaya tersebut baik dari segi financial

(keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. Dalam pandangan *fikih siyasah* pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang tertib Administrasi Kependudukan sudah sesuai dengan Syariat Islam karena pada dasarnya pemerintah dijadikan untuk pemimpin dan masyarakat sebagai khalifah sesuai dengan syariat islam.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Fikih Siyasah.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Era Anastasya
NPM : 1921020482
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Studi di Disdukcapil Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023
Penulis



Era Anastasya
NPM. 1921020482



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Studi di Disdukcapil Lampung Utara)**
Nama : **Era Anastasya**
NPM : **1921020482**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syar'iyah**

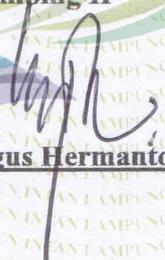
MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

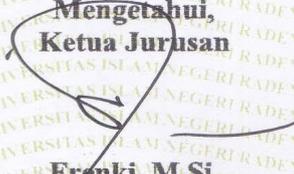
Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 195904161987031002


Dr. Agus Hermanto, M.H.I
NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**


Frenki, M.Si.
NIP. 196003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Studi di Disdukcapil Lampung Utara)”**. Disusun oleh **Era Anastasya, NPM : 1921020482**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada **Senin /05 Februari 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Era Rodiah Nur, M.H

196908081993032002



MOTTO

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik”.

(Q.S An-Nur [24]:55)



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayah nya yang telah memberikan kesabaran, kesehatan, serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam selama proses pengerjaannya serta kontribusi nya kepada:

1. Teruntuk bapak dan ibuku tercinta, terkasih, tersayang, Ibu Nanik Hartini yang selalu senantiasa mendoakanku di setiap lima waktunya, yang selalu mengajarku untuk melibatkan Allah swt di setiap kegiatanku, dan Bapak Nasrul, ku ucapkan rasa terima kasih teramat besar atas kasih sayang dan cinta yang tak lekang oleh waktu, terima kasih aku ucapkan kepada kedua orangtua atas dukungannya dari waktu ke waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Teruntuk Indah Suci Wulandari dan Andre Anastino kakak-kakak ku, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang sudah diberikan dalam bentuk apapun, sebagai adik bungsu penulis sangat bersyukur karena Allah memberikan kakak-kakak seperti kalian di hidupku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu dan akan selalu ku jaga nama baiknya.

RIWAYAT HIDUP

Era Anastasya, lahir di Kota Bumi pada tanggal 20 bulan September tahun 2001, anak bungsu dari pasangan Bapak Nasrul dan Ibu Nanik Hartini serta memiliki saudari perempuan yang bernama Indah Suci Wulandari, dan juga saudara laki-laki yang bernama Andre Anastino. Penulis menempuh pendidikan formal dari tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri 4 Tanjung Aman, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kota Bumi pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMAS Bhayangkari Kota Bumi pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019 diberi kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jurusan Hukum Tata Negara sebagai pilihan pertama untuk dapat menimba ilmu serta mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan pertemanan.

Bandar Lampung, 10 November 2023

Era Anastasya
1921020482

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Studi di Disdukcapil Lampung Utara)” ini dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D beserta staf jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si. dan jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan;
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta saran dan kritikan kepada penulis di setiap proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
6. Tempat penelitian Disdukcapil Lampung Utara, khususnya kepada Ibu Henny Yuliarsih, SE., M.M. selaku Subbagian bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bapak Iwansyah, SE. Selaku Subbagian umum dan Kepegawaian.

7. Bapak Bambang Irawan, S.Sos., MM. yang telah bersedia menjadi narasumber dalam melengkapi penelitian ini;
8. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara Kelas H angkatan 2019;
9. Teman-teman seperjuangan Hellen Marya, Lismawati dan Putri Asih Santosa yang senantiasa memberikan masukan serta motivasi untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun, Fadhillah Faiqoh dan Marisa (Ica).
11. Teman-teman KKN di Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Penengahan, Desa Tanjung Heran yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah swt membalas semua amal kebaikan kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 10 November 2023

Era Anastasya

1921020482

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fikih Siyasah	17
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	17
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah.....	18
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	21
B. Administrasi Kependudukan.....	22
1. Hak Penduduk	23
2. Dokumen Kependudukan.....	24
3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).....	25
4. Tinjauan Tentang Akta kelahiran.....	26
5. Tinjauan Umum Tentang KTP.....	27
6. Tinjauan Umum Tentang Kartu Keluarga.....	29
7. Kualitas Pelayanan Publik.....	30

8. Pandangan Islam Tentang Pelayanan.....	31
C. Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek.....	35
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Lampung Utara.....	35
2. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Utara	36
B. Gambaran Umum Disdukcapil Kabaupaten Lampung Utara	39
1. Deskripsi Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....	39
2. Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara	39
3. Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....	40
4. Sumber Daya Manusia Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....	41
5. Visi dan Misi Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....	42
6. Jenis-Jenis Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan.....	47
B. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi.....	63

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan KTP Elektronik dan Non Elektronik	27
2. Kecamatan Di Kabupaten Lampung Utara	35
3. Jumlah Pegawai sesuai dengan pangkat/ Golongan	41
4. Jumlah Pegawai sesuai dengan Pendidikan	42
5. Jenis-Jenis Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....	44
6. Capaian Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Izin Riset	73
Surat Keterangan Izin Penelitian	74
Surat Balasan Izin Penelitian	75
Foto Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	76
Foto Wawancara dengan Koordinator Administrator kependudukan.....	77
Blanko Konsultasi Skripsi	78
Surat Keterangan Rumah Jurnal	79
Surat Keterangan Cek Turnitin.....	80
Daftar Pertanyaan Wawancara	88
PERDA Kabupaten Lampung Utara	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Peneliti hendak menjelaskan terkait judul yang akan peneliti teliti yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengambil arti dan maksud yang akan digunakan, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi mengenai “ **Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan. (Studi di Disdukcapil Lampung Utara)** “. Maka penulis memaparkan definisi yang berkaitan dengan judul yakni :

Tinjauan *Fikih Siyasah* adalah suatu pandangan berdasarkan syariat yang diadakan oleh Allah swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.¹ Implementasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasi kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut memiliki unsur tujuan, masalah, tuntutan dan dampak.² Peraturan Daerah merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun kabupaten.³

¹ Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, 2019, 01.

² Dhani Ardyansyah, ‘Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik’, *Jurnal MEDTEK*, 2.3 (2010), 78–91.

³ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi

PERDA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan; bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Lampung Utara perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan; bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah yang tertuang pada *Fikih Siyasah* dapat dikenal dengan sebutan *Siyasah Tanfidziyah*, yang berarti ilmu dalam hukum islam yang membahas terkait perundang-undangan suatu Negara.⁵ Dimana membahas secara detail terkait prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat terkait dengan kekuasaan. Objek kajian *Fikih Siyasah* meliputi berbagai aspek pengaturan terkait hubungan masyarakat dengan Negara, hubungan dengan sesama masyarakat, hubungan masyarakat dengan lembaga Negara baik yang bersifat internal maupun eksternal didalam berbagai bidang kehidupan. Dapat penulis simpulkan bahwa kajian *Siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek pembahasan ilmu *siyasah* mengatur perundang-undangan yang dituntut oleh hal kenegaraan dari berbagai segi yang disesuaikan dengan norma agama serta bentuk

Pemerintah Daerah', *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Nomor 65.879 (2019), 2004-6.

⁴ Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara no 2 tahun 2022, 'Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 2 Tahun 2022', 01 (2016), 1-23 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/212046/perda-kab-lampung-utara-no-2-tahun-2022>>.

⁵ Ummahatul Lailatin Nafisah, 'Pengertian Fiqh Siyasah Dan Ruang Lingkupnya'. January 1, 2022, <https://www.academia.edu/76379951>.

realisasi kemashalatan manusia yang memenuhi kebutuhan pokoknya.

Implementasi PERDA No 2 Tahun 2022 pada pasal 2 menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh, dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya. Peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Lampung Utara perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan; bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkordinir dan berkesinambungan itulah PR penting yang akan dilaksanakan Disdukcapil Lampung Utara terkait tata tertib patuh administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah hal yang sangat penting dalam mengupayakan ketertiban hukum yang ada di masyarakat khususnya di dalam tata tertib administrasi dan di dalam keperdataan. Banyak kasus yang mengalami kendala tata tertib administrasi sangat dibutuhkan metode tertib administrasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Peristiwa kependudukan ini sendiri merupakan kejadian yang dialami penduduk yang wajib dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya yang merujuk kepada pindah datang, perubahan alamat, maupun status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.⁶ Indonesia sendiri memiliki masalah administrasi kependudukan yang mempunyai dampak positif yang sudah dituangkan pada Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang

⁶ Totoh Wildan Tohari, 'Kajian Perbandingan Dan Perbedaan Undang-Undang No . 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan Undang-Undang No . 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 23 Tahun 2006 Tentang', 23, 2013 <[https://www.academia.edu/1674_6053/Kaji an _2_Perbandingan_Undang-Undang_tentang_Administrasi_Kependudukan](https://www.academia.edu/1674_6053/Kaji_an_2_Perbandingan_Undang-Undang_tentang_Administrasi_Kependudukan)>.

administrasi kependudukan. Peraturan ini menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia.

Problematika dalam sistem kependudukan di Indonesia selalu bermuara kepada identitas yang ada dalam data base kependudukan yang dikelola oleh pemerintah. Proses database kependudukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara. Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.⁷ Pola yang digunakan dalam sistem administrasi kependudukan harus menggunakan satu identitas pada setiap warga negara, dengan adanya satu identitas yang dimiliki oleh setiap warga negara tentu akan melindungi kepentingan setiap warga negara tersebut dan akan memberikan kemudahan kepada setiap warga negara dengan manajemen pendataan yang baik dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan yang berada pada Fiqh siyasah *Tanfidziyah* merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁸ Sesuai yang dituangkan pada surat al-Nisa yang berbunyi:

⁷ Ulliynta Mona Hutasuhut and others, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 133–48 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>>.

⁸ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 45.

ي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar bberiman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”(Q.S. al-Nisa[4]:59).

Penelitian kajian fikih siyasah yang digunakan adalah Tanfidziyah. dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, Pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khatthab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.

Masalah di Indonesia terkait hak warga negara pada pelayanan sistem administrasi kependudukan belum sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2022, salah satunya di Kabupaten Lampung Utara. Hasil pengamatan yang dialami masyarakat dan pengalaman pribadi terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat lainnya mengalami kendala seperti pelayanan yang kurang baik serta

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis memutuskan melakukan penelitian di Disdukcapil Lampung Utara. Guna melakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi pengaturan administrasi kependudukan serta mekanisme yang berlangsung di lapangan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada pandangan islam dan kebijakan tata tertib administrasi kependudukan yang ada pada PERDA No 2 Tahun 2022 Di kabupaten lampung utara. Pengkajian masalah lebih ditekankan pada tinjauan Fikih siyasah terhadap implementasi kebijakan daerah yang mengatur mengenai tata tertib administrasi kependudukan daerah. Selain itu fokus penelitian yang diambil peneliti terkait pelaksanaan PERDA di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara. Penelitian tersebut akan dilakukan pada bulan Februari-Maret 2023.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tata tertib administrasi kependudukan pada Disdukcapil Lampung Utara Tahun 2022.
2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap peraturan daerah No 2 Tahun 2022 tentang tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Utara.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor Islam dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang ada di suatu daerah. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengobservasi mekanisme pelaksanaan kebijakan tata tertib administrasi kependudukan pada Disdukcapil Lampung Utara Tahun 2022.
2. Menganalisis pandangan Fikih siyasah terhadap peraturan daerah No 2 Tahun 2022 tentang tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Penulis ingin melihat sejauh apa faktor agama berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan yang ada di Indonesia termasuk kebijakan-kebijakan yang berada di daerah. Dalam studi kasus yang penulis teliti, penulis berharap dapat menemukan perubahan-perubahan yang signifikan didalam tata tertib administrasi kependudukan yang ada di daerah maupun provinsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis maupun kontekstual mengenai Fikih siyasah dan kebijakan daerah yang mengatur terkait administrasi kependudukan di Indonesia.

G. Kajian Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya kajian penelitian terdahulu merupakan inti dari teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan dengan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sub tema yang sama yang akan diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini adalah :

1. Skripsi berjudul “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Efektivitas Pelayanan E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat “ Karya Muhammad Redo Albert Aryanto Tahun 2022. Research Gap pada penelitian ini terdapat pada Bagaimana ke Efektivitasan pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat? Kedua, Bagaimana Tinjauan

Fikih siyasah terhadap Efektivitas pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat ? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yang mana data diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian mengenai analisa Efektivitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Kesimpulan Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat dalam memberikan pelayanan berupa pembuatan e-KTP sudah berupaya semaksimal mungkin, namun mengenai sarana prasarana memang kurang memadai. Seperti halnya kursi dan gedung yang belum direnovasi. Berkaitan dengan tinjauan Fikih Siyasah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat sudah baik karena telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU. No. 25 Tahun 2009 serta menjawab isu-isu yang ada di masyarakat dengan Inovasinya yaitu membuat surat keterangan (suket) jikalau blangko habis dan mengadakan program jemput bola terhadap Instansi-instansi seperti sekolah-sekolah dan pondok pesantren.⁹

2. Jurnal Ilmiah berjudul “Implementasi Nilai Nilai Fikih Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah “ Karya Wahyu Abdul Jahar, Pada Jurnal Al-Imarah Vol 4, No 1 Tahun 2019. Research Gap pada penelitian ini terdapat pada implementasi hukum Fikih siyasah pada peraturan syariat. Kajian ini sangat penting karena Perda Syari’ah yang dibuat tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Fikih siyasah akan mengering dan kehilangan semangat keislamannya. Bahkan hukum yang lahir justru dapat menciptakan ketidakadilan dan kesejahteraan jika nantinya

⁹ M. Redo Albert Aryanto, ‘Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Pelayanan E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Skripsi’, 01 (2016), 1–23..

diterapkan di masyarakat. Setelah peneliti melakukan kajian secara mendalam ditemukan kesimpulan bahwa hukum syariat yang telah menerapkan nilai siyasah diantaranya adalah Perda Syari'ah yang berorientasi dan taat pada syariat Islam, Perda Syari'ah yang berorientasi pada kemaslahatan nilai keadilan dan persamaan hak, Perda syariat yang menghindari unsur aniaya dan martabat, dan Perda syariat yang berlandaskan asas musyawarah.¹⁰

3. Jurnal Ilmiah berjudul “Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta” Karya Nadia Ayu Dewantari dan Itok Dwi Kurniawan Pada Jurnal Inovasi Penelitian Vo. 2 No. 5 Tahun 2021. Gap pada penelitian ini terdapat pada Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang seiring dengan tumbuhnya pembangunan yang ada. Pemerintah telah membuat suatu kebijakan tentang bagaimana menetralsir keberadaan penduduk pendatang dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Kota Surakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta.¹¹
4. Jurnal Karya Ilmiah berjudul “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung “Karya Endah Crstianingsih Pada Jurnal Ilmiah Magister

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, ‘Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah’, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 83–96. <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as>.

¹¹ Nadia Ayu Dewantari and Itok Dwi Kurniawan, ‘Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.5 (2021), 1413–32.

Administrasi Vol. 12 No 2 Tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa dimensi dan indikator. Variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan dielaborasi menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu : organisasi, interpretasi dan penerapan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sementara itu analisis tabulasi merupakan teknik yang digunakan dalam analisis data. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara angket, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan masuk ke dalam kategori cukup baik. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung belum optimal. Artinya konsep organisasi, interpretasi dan penerapan belum dipahami sepenuhnya oleh para pegawai. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain, memberikan sosialisasi, pelatihan, pemahaman tentang implementasi kebijakan administrasi kependudukan.¹²

Berdasarkan uraian di atas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu membahas implementasi administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan Fikih Siyasah pada PERDA Kabupaten Lampung Utara No. 2 Tahun 2022 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat induktif, dimana penelitian dilakukan berdasarkan atas data yang yang diperoleh. Penggunaan metode penelitian secara kualitatif ditunjukkan untuk menggambarkan dan

¹² Endah Cristianingsih, 'Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung', *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12.2 (2020). https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/ji_mia/article/view/329.

menganalisis suatu fenomena ataupun peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi atau pemikiran seseorang baik itu secara individu maupun kelompok. Berikut adalah sistematis yang digunakan dalam penerapan metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada di lapangan.¹³ Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari lokasi penelitian, dengan melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Utara No 2 Tahun 2022 terkait tata tertib administrasi kependudukan yang ada di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diamati di daerah penelitan.¹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwasanya penelitan ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh guna mengetahui pelaksanaan mekanisme kebijakan PERDA No 2 Tahun 2022 Tentang tata tertib administrasi kependudukan.

¹³ Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Iterasi: Media Publisng, 2015),45.

¹⁴ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jawa barat: cv jejak, 2018), 124.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah pegawai Disdukcapil Lampung Utara yang berjumlah 19 orang diantaranya pegawai bagian pelayanan administrasi publik.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai "wakil" dari para anggota populasi.¹⁶ Teknik pengambilan Sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah *purposive sampling* Dimana sampling yang digunakan mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sampel/objek yang menjadi sumber data yaitu ada 4 subjek diantaranya koordinator administrator database kependudukan ahli muda yaitu bapak Bambang Irawan S.Sos., M.M., Sub bagian pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu Ibu Henny Yuliarsih, SE., M.M., Bagian bidang pelayanan pendaftaran penduduk yaitu Bapak Ferry Wijaya, S.Si., MH., dan Bidang Pelayanan dan catatan sipil yaitu Ibu Diah Novilia, S.Sos., MM.

3. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁵ Supardi, 'Populasi Dan Sampel Penelitian', *Unisia*, 13.17 (1993), 100–108 <<https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art13>>.

¹⁶ *Ibid*, 13..

- a. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari responden penelitian menggunakan daftar pertanyaan.
- b. Data sekunder atau data pendukung merupakan jenis data yang diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal serta data dan informasi dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin yang merupakan jenis wawancara dengan membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, sehingga kebenarannya tidak dapat diragukan lagi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini langsung dilaksanakan dengan pemilik usaha warung internet yang berada di daerah penelitian.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian atau pengamatan secara langsung, serta pencatatan secara

sistematis.¹⁷ Observasi dilakukan pada usaha warung internet yang menjadi sampel dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data tentang hal-hal atau variabel tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen catatan, transkrip dan buku-buku, berkas, surat kabar dan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasipasi. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) pengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

¹⁷ Nikolaus Duli, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS (Yogyakarta: Deepublish, 2019),127.

¹⁸ Ismail Nurdin and Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 76.

¹⁹ Muhammad Darwin and others, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif (Media Sains Indonesia, 2021), 56.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena dari aparatur Dinas Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dalam penulisan penelitian, dalam Penelitian ini disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab satu, pada bab satu ini berisi pendahuluan yang memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, serta metode penelitian. Bab dua yang berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat di penelitian menggunakan teori Fikih siyasah dan secara kusus menggunakan teori kebijakan terkait tertib administrasi kependudukan.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek penelitian serta penyajian sesuai fakta yang berdasarkan di lapangan yaitu data yang diambil melalui observasi langsung di Disdukcapil Kabupaten Lampung utara mulai dari data pegawai baik sub bagian administrasi kependudukan, pencatatan sipil maupun pegawai bidang pembuatan KTP dan data pendukung lainnya.

Bab empat memuat tentang analisis dan interpretasi data berupa temuan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun

2022 tentang tertib administrasi kependudukan. Kemudian ditinjau berdasarkan pandangan Islam secara fikih siyasah terkait administrasi kependudukan. Bab lima sebagai penutup membahas tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas terkait PERDA nomor 2 Tahun 2022 dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Administrasi Kependudukan berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan pada penghambat pelayanan tersebut sehingga pemerintah mampu menghambat upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.
2. Pandangan fikih siyasah dalam pandangan siyasah Tanfidziyah terkait pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara terlaksana dengan cukup baik. Pada dasarnya pemerintah dijadikan untuk pemimpin dan masyarakat sebagai khalifah sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dalam peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah daerah khususnya kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk lebih meningkatkan pelayanan serta memperhatikan dan mengimplementasikan

Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Asministrasi Kependudukan.

2. Kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk lebih Memahami dan mengetahui struktur dalam pembuatan terkait Administrasi kependudukan.



DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Rizaldin Zamri. Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah. Jakarta:Dee publish. 2019.
- Akhmaddhian, Suwari. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance, *LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9.01 (2018): 30–38.
- Ardyansyah, Dhani. Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2.3 (2010): 78–91
- Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Peneliti. Bogor: Kencana. 2003.
- Boediono, B. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineke Cipta. 2003.
- Cristianingsih, Endah. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12.2 .(2020):12-17.
- Darwin, Muhammad, Marianne Reynelda Mamondol, Salman Alparis Sormin, Yuliana Nurhayati, Hardi Tambunan, Diana Sylvia, and others. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Media Sains Indonesia. 2021.
- Dewantari, Nadia Ayu, and Itok Dwi Kurniawan. Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.5. (2021): 1413–32.
- Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Jakarta: Deepublish. 2019.
- Fauzani, Muhammad Addi. The Shifting in the Legal Politics of Regulating the General Principles of Good Governance in Indonesian Legislation. *As-Siyasi: Journal of Constitutional*

Law, 3.1 (2023):1–24.

Hakim, Dani Amran. *Constitutional Issues in Indonesia Application To*. Jakarta:Rineka cipta. 2023.

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022): 133–48 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>>

Iqbal, M, and N Madjid. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.

Jafar, Wahyu Abdul. Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasa Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. 4.1. (2019): 83–96.

Jai, Stefanus Arwandi, Dody Setyawan, and Ignatius Adiwidjaja. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5.1 (2016):11-15.

Johan, Albi Anggito Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. jawa barat: cv jejak. 2018.

Kusmidi, Henderi. Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasa', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6.2. (2021): 156–70.

M. Redo Albert Aryanto. Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Efektivitas Pelayanan E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Skripsi. 01 (2016):1–23.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: *Akademi Manajemen Perusahaan YKPN*. 2005.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah', *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Nomor 65.879 (2019), 2004–6

Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam*

Fiqh Siyasah, PT Nasya Expanding Management. Jawa tengah: NEM-Anggota IKAPI. 2019.

Mukri, Moh. Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia' *Dalam, Jurnal Analisis*, 11. (2021): 12-23.
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/608/0>>

Mustofa, Andi. Pantun: Jejak Tradisi Lisan Bangsa Melayu Di Prancis', *Sosial Budaya*, 17.1 (2020), 56–63

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Soalsi*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia. 2019.

Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara no 2 tahun 2022, 'Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 2 Tahun 2022', 01 (2016), 1–23
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/212046/perda-kab-lampung-utara-no-2-tahun-2022>>

Prijono, Tjiptoherijanto. Kependudukan Birokrasi Dan Reformasi Ekonomi', *Pemikiran Dan Gagasan Masa Depan Pembangunan*. Jakarta: Edisi Pertama, Penerbit Rineka Cipta. 2004.

Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.

Riski, Kurniawan, 'Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)' (Uin Raden Intan Lampung, 2022)

Rohman, Didik Fatkhur, 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu' (Brawijaya University, 2013)

Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: iterasi: media publishing, 2015)
<https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Metodologi_Penelitian/N/Qphfdwaaqbj?hl=Id&gbpV=0>

Santoso, Rudi, And Agus Hermanto, 'Analisis Yuridis Politik Hukum TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8.01 (2020), 125–35

Saputri, Cynthia Cindy Ayu, 'Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu' (Brawijaya University)

Siagian, Sondang P, *Peranan Staf Dalam Managemen* (-, 1919)

Supardi, 'Populasi Dan Sampel Penelitian', *Unisia*, 13.17 (1993), 100–108 <<https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art13>>

Totoh Wildan Tohari, 'Kajian Perbandingan Dan Perbedaan Undang-Undang No . 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan Undang-Undang No . 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 23 Tahun 2006 Tentang', 23, 2013 <https://www.academi.ae/du/16746053/Kajian_2_Perbandingan_Undang-Undang_tentang_Administrasi_Kependudukan>

Trisna, Kadek Dwiky Nugraha Yoga, Ketut Sudiatmaka, And Ni Ketut Sari Adnyani, 'Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022), 297–314

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan', *Transportation*, 1.January (2006), 21–30 <<https://doi.org/10.1002/Ejoc.201200111>>

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik', *American Journal Of Research Communication*, 5.August (2009), 12–42 <<http://Download.Esri.Co m/Archydro/Archydro/Doc/Overview Of Arc Hydro Terrain Preprocessing Workflows .Pdf%0A https://Doi.Org/10.1016/J.Jh ydro.2017.11.003%0Ahttp://Sites.Tufts.Edu/>>

Gis/Files/2013/11/ Watershed-And-Drainage-Delineation-By-Pour-Point.Pdf%0Awww>

Zuhayli, W, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989)
<<https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=68byzAEACAAJ>>

